

DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Endang Nurma¹, Syafruddin^{2*}

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: syafagent@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 02 Februari 2025

Accepted: 04 April 2025

Published: 30 April 2025

Keywords

Number of Population;
Minimum Wage;
Economic Growth;
Income Distribution Inequality.

Abstrak

This study aims to determine the effect of number of population, minimum wages, and economic growth on income distribution inequality in Sumbawa District in 2019-2023. The type of this study was associative study which aims to determine the direction and strength of the effect of the independent variables, namely number of population (X_1), minimum wage (X_2), and economic growth (X_3) on the dependent variable, namely income distribution inequality in Sumbawa District in 2019-2023 (Y). The type of data used in this study was quantitative data obtained from secondary sources using documentation techniques. The data was processed using the SPSS application to be analyzed using multiple linear regression analysis techniques, partial hypothesis testing (t -test), simultaneous hypothesis testing (F -test) and coefficient of determination testing (R^2). The results of this study showed that the number of population (X_1), minimum wage (X_2), and economic growth (X_3) do not have a significant effect on income distribution inequality in Sumbawa District in 2019-2023, either partially or simultaneously. The percentage of the effect of population, minimum wages and economic growth on income distribution inequality in Sumbawa District was 2%, while the remaining of 98% was effected by other variables outside this study, such as unemployment, poverty, human development index.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar di dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang maju, sukses dan tinggi itu dapat membuat keadaan ekonomi di daerah yang bersangkutan menjadi sejahtera dan masyarakat juga dapat merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut (Amila dan Abidin, 2024).

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi isu penting bagi pembangunan setiap Negara dan menjadi persoalan ekonomi paling mendasar yang menjadi pusat perhatian, karena sulit terpecahkan hampir di setiap negara, termasuk Indonesia. Munculnya permasalahan ketimpangan pendapatan merupakan dampak dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang merata di suatu daerah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat. Teori disparitas (ketimpangan) pendapatan menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga terjadi kesenjangan atau perbedaan yang mencolok antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Ketimpangan ini menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata dalam suatu populasi, yang dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam kekayaan, kesempatan, serta kualitas hidup (Wahyuni dan Andriyani, 2022).

Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan ekonomi dan kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan antar masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin), sehingga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi (Febriyani & Anis, 2021).

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak Negara Sedang Berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dirumuskan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar kesehatan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, tidak mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Hanya saja yang membedakan adalah proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing Negara, serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya (Fattah *et al.*, 2022).

Kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan (Silaban *et al.*, 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah adalah dengan melihat koefisien gini, dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah. Ketika nilai koefisien gini suatu daerah mendekati 0, maka distribusi pendapatan di daerah tersebut semakin merata. Sebaliknya, ketika nilai koefisien gini suatu daerah mendekati 1, berarti distribusi pendapatan di daerah tersebut semakin timpang. Apabila suatu daerah memiliki nilai koefisien gini lebih dari 0.4 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut termasuk tinggi (Julihanza dan Khoirudin, 2023).

Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai sumber timbulnya masalah baru. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang tinggi di suatu daerah harus berfokus pada pemerataan distribusi pendapatan sehingga manfaatnya mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan. Untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, penting untuk terlebih dahulu memahami berbagai faktor penyebab ketimpangan tersebut. Berdasarkan hasil pengkajian penelitian sebelumnya, diidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya adalah jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah jumlah penduduk. Hasibuan dan Rukiah (2021) menjelaskan bahwa perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat suatu wilayah daerah untuk mencapai salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi, yaitu akan menyebabkan jurang yang sudah ada diantara beberapa golongan masyarakat menjadi bertambah lebar. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dapat berpotensi meningkatkan angka ketimpangan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan kualitas yang baik akan memberikan suatu keuntungan, namun jika penambahan penduduk tanpa disertai dengan kualitas yang baik, maka akan menjadi masalah besar, seperti terjadinya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin meningkat.

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah upah minimum. Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang mengurangnya. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja sehingga sebagian pekerja akan menjadi pengangguran (Helmy *et al.*, 2024). Namun, disisi lain, Kenaikan upah minimum di setiap provinsi dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Menurut penelitian (Mudana dan Purbadharmaja, 2024), upah minimum mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena dapat menurunkan disparitas pendapatan di tingkat provinsi dan daerah melalui penciptaan lapangan kerja. Kenaikan upah minimum akan menguntungkan mereka yang terlibat dalam perekonomian sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

Selain faktor-faktor sebelumnya, ketimpangan pendapatan juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Menurut Fadel *et al.* (2021), pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat cenderung akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan pendapatan, dimana pendapatan yang tercipta cenderung mengumpul pada wilayah yang mempunyai faktor-faktor produksi lebih banyak. Seringkali investasi tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan karena tidak berdampak pada besarnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran serta kesenjangan pendapatan masyarakat, diantaranya dengan pembangunan ekonomi yang merata. Pemanfaatan investasi hendaknya mengutamakan hal-hal yang bersifat padat karya dan bukan padat modal, sehingga dapat membuka peluang lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat.

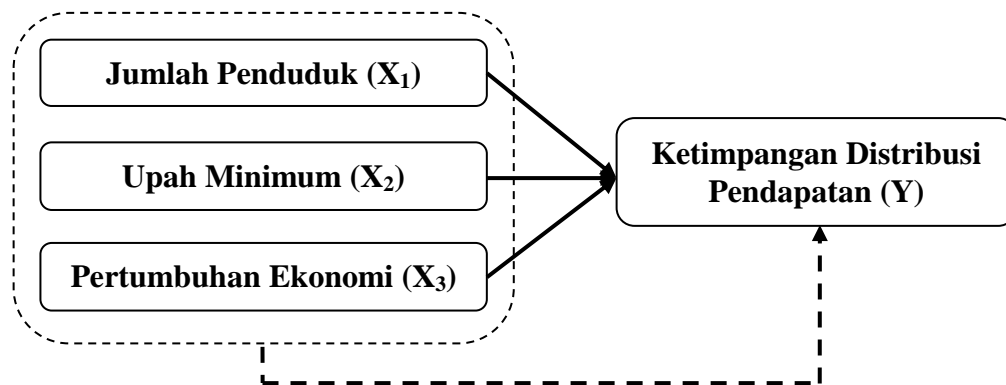
Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah angka ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari ketimpangan pendapatan nasional, laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, dan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan setiap tahunnya mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut turut berperan dalam terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, pada penelitian akan dikaji secara empirik tentang **Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Sumbawa**. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa sehingga diharapkan bisa menjadi gambaran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait upaya dalam pemerataan pembangunan sehingga dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal menurut Husein Umar (2019) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan atau pengaruh variabel independen (variabel bebas) yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y), baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan hasil kajian empiris dan teoritis yang telah uraikan, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif yang akan dikaji dalam penelitian, meliputi data jumlah penduduk, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sujarweni (2022), data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti dari sumber informasi kedua, seperti yang didapat dari perpustakaan ataupun laporan-laporan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari dokumen atau arsip yang sudah ada berupa laporan-laporan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, baik yang sudah dipublikasikan atau belum.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi. Menurut Narimawati, *et al.* (2020), teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi. Dari asal katanya dokumentasi, yakni dokumen, yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karena itu, penggunaan metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari catatan tertulis dokumen dan arsip yang sudah ada, seperti laporan tahunan yang memuat data mengenai jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023, baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel-variabel independen (variabel bebas) yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y). Seluruh data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk dikaji menggunakan teknik yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji hipotesis parameter parsial (uji t), uji hipotesis parameter simultan (uji F), dan uji koefisien determinan (R^2) (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pada penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel independen (variabel bebas) yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y).

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.377	.011		33.035	.019
Jumlah Penduduk	.078	.038	2.661	2.045	.290
Upah Minimum	-.078	.043	-2.657	-1.803	.322
Pertumbuhan Ekonomi	.022	.019	.745	1.145	.457

a. Dependent Variable: Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Sumber: Data primer diolah (Output SPSS), 2025.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara sistematis bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0.377 + 0.078 (X_1) + (-0.078) (X_2) + 0.022 (X_3) + e$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Upah Minimum

X_3 = Pertumbuhan Ekonomi

e = Residual atau *error* (10%).

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai constanta (a) sebesar 0.377. Nilai ini merupakan angka konstan yang berarti bahwa apabila variabel-variabel bebas yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan 0 (nol), maka nilai variabel terikat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y) adalah konstan sebesar 0.377.
- b. Nilai β_1 koefisien regresi variabel jumlah penduduk (X_1) adalah sebesar 0.078 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah (berbanding lurus) yang berarti bahwa jika nilai variabel jumlah penduduk (X_1) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai variabel ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y) juga akan meningkat sebesar 0.078. Demikian pula sebaliknya, dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya, yaitu upah minimum (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (X_3) tidak mengalami perubahan atau konstan 0 (nol).
- c. Nilai β_2 koefisien regresi variabel upah minimum (X_2) adalah sebesar -0.078 dan bernilai negatif. Nilai negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah (berbanding terbalik) yang berarti bahwa jika nilai variabel upah minimum (X_2) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai variabel ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.078. Demikian pula sebaliknya, dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya, yaitu jumlah penduduk (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_3) tidak mengalami perubahan atau konstan 0 (nol).
- d. Nilai β_3 koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) adalah sebesar 0.022 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah (berbanding lurus) yang berarti bahwa jika nilai variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai variabel ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.022. Demikian pula sebaliknya, dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya, yaitu jumlah penduduk (X_1) dan upah minimum (X_2) tidak mengalami perubahan atau konstan 0 (nol).

2. Uji Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Uji hipotesis parameter parsial atau uji t adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penentuan penerimaan hipotesis dengan uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai probabilitas dengan taraf nyatanya. Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) serta pada nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf nyatanya ($sig. < 0.05$).

Uji-t pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikan pengaruh masing-masing variabel independen (variabel bebas) yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y). Hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.377	.011		33.035	.019
Jumlah Penduduk	.078	.038	2.661	2.045	.290
Upah Minimum	-.078	.043	-2.657	-1.803	.322
Pertumbuhan Ekonomi	.022	.019	.745	1.145	.457

a. Dependent Variable: Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Sumber: Data primer diolah (Output SPSS), 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) yang disajikan pada tabel diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} variabel jumlah penduduk (X_1) adalah sebesar 2.045, sedangkan nilai t_{tabel} pada derajat kebebasan ($df=n-k=5-4=1$) dan $\alpha = 5\%$ (0.05) adalah sebesar 12,706, sehingga nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($2.045 < 12,706$). Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0.290 lebih besar dari taraf nyata yang disyaratkan sebesar 0.05 ($0.290 > 0.05$). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.

b. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} variabel upah minimum (X_2) adalah sebesar -1.803, sedangkan nilai t_{tabel} pada derajat kebebasan ($df=n-k=5-4=1$) dan $\alpha = 5\%$ (0.05) adalah sebesar 12,706, sehingga nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($-1.803 < -12,706$). Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0.322 lebih besar dari taraf nyata yang disyaratkan sebesar 0.05 ($0.322 > 0.05$). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.

c. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) adalah sebesar 1.145, sedangkan nilai t_{tabel} pada derajat kebebasan ($df=n-k=5-4=1$) dan $\alpha = 5\%$ (0.05) adalah sebesar 12,706, sehingga nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($1.145 < 12,706$). Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0.457 lebih besar dari taraf nyata yang disyaratkan sebesar 0.05 ($0.457 > 0.05$). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.

3. Uji Hipotesis Parameter Simultan (Uji F)

Uji hipotesis parameter simultan atau uji F adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat kepercayaan alpha yang ditentukan sebesar 5% serta membandingkan nilai probabilitas dengan taraf nyatanya. Variabel-variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara simultan, jika nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$) serta pada nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf nyatanya ($sig. < 0.05$).

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel-variabel bebas yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y). Hasil pengujian hipotesis parameter simultan (uji F) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Hipotesis Parameter Simultan (Uji-F)
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	3	.001	1.434	.535 ^b
	Residual	.001	1	.001		
	Total	.003	4			
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Jumlah Penduduk						
b. Dependent Variable: Ketimpangan Distribusi Pendapatan						

Sumber: Data primer diolah (Output SPSS), 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis simultan (uji F) yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 1.434, sedangkan nilai F_{tabel} pada derajat kebebasan ($df_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$) dan ($df_2 = n - k = 5 - 4 = 1$) dan $\alpha = 5\%$ (0.05) adalah sebesar 216, sehingga nilai F_{hitung} lebih kecil dari pada nilai F_{tabel} ($1.434 < 216$). Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0.535 lebih besar dari taraf nyata yang disyaratkan sebesar 0.05 ($0.535 > 0.05$). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel bebas yang terdiri atas jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas yang terdiri atas jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap

variabel dependen (variabel terikat), yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023 (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.183 ^a	.033	.020	2.49451

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Jumlah Penduduk
b. Dependent Variable: Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Sumber: Data primer diolah (Output SPSS), 2025.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.020 dan berada pada kategori sangat lemah. Hal ini mengandung arti bahwa kemampuan variabel-variabel jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 2%, sedangkan sisanya sebesar 98% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (Farhan dan Sugianto, 2022).

Pembahasan

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan perbedaan pendapatan yang akan mempengaruhi perekonomian. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, di antaranya adalah jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis datayang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan secara terperinci berikut ini.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah jumlah penduduk. Tingginya jumlah penduduk juga memiliki potensi untuk mempengaruhi pendapatan yang akan diterima, khususnya bergantung pada sejauh mana pembangunan ekonomi dapat berkembang. Fenomena ini terutama teramati di negara-negara nonindustri seperti Indonesia. Kelas atas masyarakat sering kali memiliki kekuatan atau kemudahan lebih besar dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Akibatnya, masalah kemiskinan terjadi dan ketimpangan pendapatan semakin meningkat (Rahman dan Putri, 2021).

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya laju pertumbuhan jumlah penduduk tidak memberikan dampak apapun terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal itu dikarenakan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk tidak diikuti dengan perluasan lapangan pekerjaan pada sektor formal. Hal ini menyebabkan banyak angkatan kerja yang bekerja dalam sektor informal, seperti petani, nelayan, buruh, dan pedagang sehingga tidak menimbulkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arafah dan Khoirudin (2022) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di

Provinsi Bali. Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan sebagian besar penduduknya berada pada usia non-produktif, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi yang nyata antar penduduk.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Upah minimum adalah salah satu faktor yang diduga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ketika standar minimum upah ditetapkan terlalu rendah, maka standar hidup layak bagi pekerja tidak terpenuhi. Namun jika ditetapkan terlalu tinggi, maka memungkinkan terjadi *trade-off employment* yang tidak bisa dihindari seperti terhambatnya potensi perluasan kesempatan kerja, terjadi substitusi tenaga kerja ke mesin, PHK hingga mendorong tutupnya perusahaan. Selain itu, tingkat upah minimum yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuannya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Fanshuri dan Saputra, 2022).

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya standar minimum upah yang ditetapkan tidak memberikan dampak apapun terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal itu dikarenakan kebijakan upah minimum hanya mempengaruhi sektor formal dan tidak mempengaruhi sektor informal, seperti petani, nelayan, buruh, dan pedagang yang menjadi profesi mayoritas bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariesta *et al.* (2022) yang menemukan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ketidakmampuan variabel upah minimum dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan sebagian besar penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta bekerja di sektor informal, seperti di sektor pertanian dan perdagangan yang tidak terikat kontrak sehingga pendapatan yang mereka dapatkan setiap bulannya tidak tergantung dengan adanya besaran upah pokok maupun tunjangan lainnya.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

faktor lain yang diduga yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada awalnya mungkin memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, namun ketika pertumbuhan ekonomi terus berlanjut tanpa diiringi dengan pemerataan pembangunan, maka manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan mayoritas masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Akibatnya, banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Mudana dan Purbadharmaja, 2024).

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyaningrum *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi pada tahapan awal dari suatu pembangunan dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.
2. Upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.
3. Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.
4. Jumlah penduduk, Upah minimum dan Pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2023.
5. Kemampuan variabel-variabel jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 2%, sedangkan sisanya sebesar 98% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap analisis pengaruh jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan pembandingan sekaligus pelengkap penelitian ini.
2. Untuk pemerintah agar bisa lebih serius lagi dalam menangani masalah ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa dan bisa lebih meningkatkan kerja sama dengan segala lapisan masyarakat.
3. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk menambah variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan seperti indeks pembangunan manusia, investasi, pendidikan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, & Abidin, M.Z. (2024). Kesenjangan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2): 389-398.
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2): 628-636.
- Ariesta, L.C.O.W., Sodik, J. & Nuryadin, D. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota dan Keterkaitan Spasial. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(5): 737-754 .
- Fadel, M., Mallongi, S., Arifin, & Selong, A. (2021). Pengaruh Investasi dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri di Kota Makassar. *Center of Economic Student Journal*, 4(2): 154-162.
- Fanshuri, R., & Saputra, P.M.A. (2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1): 148-160.

- Farhan, M., & Sugianto. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal*, 1(4): 243-258.
- Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A.N. (2022). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 1(1): 108-125.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4): 9-16.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi Kesepuluh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, E.Y., & Rukiah. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomin Provinsi Sumatera Utara. *Profjes: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1): 626-642.
- Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2): 907-919.
- Mudana, E.W.E., & Purbadharmaja. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3): 9601-9612.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winarti, M. B. (2020). *Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahman, R., & Putri, D.Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(3): 37-48.
- Silaban, P.S.M.J., Sianturi, A., & Sembiring, J.P.B. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Sumatera Utara. *NIAGAWAN*, 13(1): 66-78.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2022). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami (Cet. 2023)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistyaningrum, B.I., Bhinadi, A., & Astuti, R.D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *SINOMIKA JOURNAL*, 1(4): 891-902.
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1): 39-47.

